

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PERIZINAN DAN PERPAJAKAN PENGELOLA SITUS *AIR BED AND BREAKFAST* TERKAIT KEGIATAN PENYEWAAN TEMPAT TINGGAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA (1387086)

AirBnB merupakan penyedia aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen melalui sebuah aplikasi. Pada kenyataannya aplikasi *AirBnB* telah berhasil merambah ke Negara Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara yang berdiri dengan dasar-dasar hukum, maka legalitas perizinan dalam sebuah bidang usaha harus diperhatikan demi keamanan dan kelancaran proses berjalannya suatu usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *AirBnB* harus memiliki legalitas dalam perizinan walaupun *AirBnB* merupakan aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen, jadi tidak hanya pelaku usaha yang bergabung pada *AirBnB* saja yang harus memiliki perizinan tetapi *AirBnB* sendiri harus memiliki legalitas dalam melakukan usahanya. Selain itu *AirBnB* juga harus membayar pajak atas pemasukan yang diperoleh.

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis aplikasi *AirBnB* dalam hal perizinan dan pembayaran pajak adalah metode yuridis normatif yakni metode yang dilakukan dengan mengolah bahan hukum sekunder yang berupa sumber pustaka untuk mendapatkan data teori yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang – Undang ITE, Undang – Undang PT, melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Kantor Perwalian Perusahaan Asing (KPPA).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, menyatakan penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Beroperasinya situs *AirBnB* di Indonesia walaupun belum memiliki legalitas menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah yang tidak mendapatkan pemasukan dari pajak, dan juga bagi konsumen yang tidak mendapatkan perlindungan ketika merasa dirugikan dalam penggunaan situs *AirBnB*.

Kata Kunci : *Legalitas, Perizinan, AirBnB, dan Perpajakan*

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF AIR BED AND BREAKFAST DEVELOPER LICENSING AND TAX OBLIGATION FOR THE ROOM RENTING ACTIVITIES RELATED TO STELLING RECHT OF INDONESIA

Lydia Romatua Elisabeth

(1387086)

Airbnb is the application connecting entrepreneurs with consumers through an application. In fact application *AirBnB* has successfully expanded to country. As Indonesia is a country which stands by dasar-dasar law, then legality licensing in a other businesses must be considered by security and the smooth process of the an effort. Business activities conducted by *airbnb* must have legality in a license although *airbnb* is application connecting entrepreneurs with consumers, so not only entrepreneurs who joined in *airbnb* it must have licenses but *airbnb* alone must have legality of doing business. Besides *airbnb* also have to pay taxes on revenue obtained.

The methodology used to analyze application *airbnb* in terms of licenses and tax payments is the method normative method juridical is done by processing of secondary law of the library to get data theory that could serve as basis in research. In addition we conducted approach to the various regulations is a act law, act law pasar modal, act law Pajak Penghasilan, the act law ite, the act law pt, Government regulation of Indonesia about Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, and Presidential Decree of Indonesia about Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA).

Section of article 5 paragraph clause 2 act law number 25 years 2007 about investment, said foreign capital investment obliged in the form of limited liability based on Indonesian law and domiciled in the country. The site *airbnb* in Indonesia although not have legality cause uncertainty legal adverse effect many parties, including the not receive up from taxes, and also for those who do not get protection when feel aggrieved in the use of *airbnb* site

Kata Kunci : *legality, licensing, AirBnB, and taxation*

DAFTAR ISI

Hal Judul

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II ASPEK HUKUM PERIZINAN DAN PERPAJAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM HUKUM POSITIF

A. Pengaturan Perizinan	25
1. Pengertian Umum Perizinan	25
2. Perizinan Sebagai Instrument Hukum Sikap Tindak Administrasi Negara	29
3. Elemen Pokok Perizinan	30
4. Manfaat dan Tujuan Pemberian Izin	34
5. Fungsi Pemberian perizinan.....	35
6. Asas – asas perizinan	36
B. Pengaturan Perpajakan.....	37
1. Pengertian Pajak.....	37
2. Asas – asas Pemungutan Pajak	39
3. Fungsi Pajak.....	41
4. Teori Pemungutan Pajak.....	42
5. Subjek Pajak dan Objek Pajak	44
6. Sistem Pemungutan Pajak.....	50

BAB III TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Elektronik	52
1. Pengertian Transaksi Elektronik	53
2. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)	58
B. Dasar Hukum Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	62
1. Legalitas Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	62
C. Legalitas Transaksi Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan	65
D. Proses Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>)	68
1. Legalitas Transaksi Elektronik (<i>E-commerce</i>).....	68
2. Tahapan Melakukan Transaksi <i>e-commerce</i>	73
E. Bentuk Pembayaran Dalam Melakukan Transaksi <i>e-commerce</i>	75
F. Problematika Dalam Melakukan Transaksi <i>e-commerce</i>	76
G. Problematika Dalam Melakukan Transaksi <i>e-commerce</i>	76

**BAB IV TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PERIZINAN DAN PERPAJAKAN
PENGELOLA SITUS *AIR BED AND BREAKFAST* TERKAIT
KEGIATAN PENYEWAAN TEMPAT TINGGAL DIKAITKAN
DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

- A. Legalitas Kegiatan usaha yang Dilakukan Oleh Situs *AirBnB* Sebagai Situs Penghubung Antara Penyedia Hunian Dengan Konsumen Dihubungkan Dengan Hukum Perizinan yang Berlaku Di Indonesia 80
- B. Kewajiban Perpajakan Yang Harus Ditanggung Oleh Penyelenggara Situs *AirBnB* Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Memperoleh Penghasilan Yang Bersumber Dari Indonesia 93

BAB V PENUTUP

- A. SIMPULAN..... 103
- B. SARAN..... 105

DAFTAR PUSTAKA..... 107